



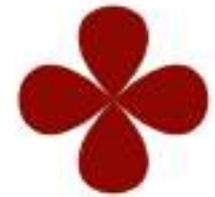
BIRO KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN SOSIAL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH



2023





DAFTAR ISI

ii.

Daftar
Isi

iii.

Kata
Pengantar

iv.

Ringkasan
Eksekutif

1.

Bab 1:
Pendahuluan

9.

Bab 2:
Perencanaan
Kinerja

15.

Bab 3:
Perencanaan
Kinerja

43.

Bab 4 :
Penutupan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seluruh program kerja dan kegiatan Biro Keuangan Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik. Laporan Kinerja ini memuat informasi capaian kinerja terkait proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 serta perbandingan capaian kinerja pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan menjadi umpan balik bagi Biro Keuangan untuk melakukan peningkatan kinerja.

Selaku pimpinan Biro Keuangan, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja seluruh pegawai Biro Keuangan sepanjang tahun 2023 ini. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada para mitra kerja yang turut mendukung pencapaian kinerja Biro Keuangan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahun-tahun selanjutnya.

Jakarta, Februari 2024
Kepala Biro Keuangan



Andy Kurnia Munggaran

RINGKASAN EKSEKUTIF

CAPAIAN KINERJA BIRO KEUANGAN

102,02%

PENYERAPAN ANGGARAN

99,18%

Capaian IKK 1.1

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Target : 100% Pagu : Rp1.663.580.000
Realisasi : 100% Realisasi : Rp1.658.413.659

Capaian Kinerja
100%

Penyerapan Anggaran
99.69%

Capaian IKK 2.1

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal

Target : 90 Pagu : Rp108.855.000
Realisasi : 91,35 Realisasi : Rp107.789.000

Capaian Kinerja
101,5%

Penyerapan Anggaran
99.02%

Capaian IKK 1.2

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial

Target : 90 Pagu : Rp2.637.476.000
Realisasi : 91,22 Realisasi : Rp2.632.556.241

Capaian Kinerja
101,36%

Penyerapan Anggaran
99.81%

Capaian IKK 2.2

Nilai SAKIP Biro Keuangan

Target : 83 Pagu : Rp85.504.000
Realisasi : 83* Realisasi : Rp85.504.000

Capaian Kinerja
100%

Penyerapan Anggaran
100%

Capaian IKK 1.3

Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial

Target : 76,52% Pagu : Rp621.007.000
Realisasi : 83,56% Realisasi : Rp620.209.156

Capaian Kinerja
109,20%

Penyerapan Anggaran
99.87%

Capaian IKK 2.3

Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Keuangan

Target : 90 Pagu : Rp77.895.464.000
Realisasi : 90,08 Realisasi : Rp77.224.730.069

Capaian Kinerja
100,09%

Penyerapan Anggaran
99.14%

BAB I

PENDAHULUAN

-
- A. *Latar Belakang*
 - B. *Tugas dan Fungsi*
 - C. *Struktur Organisasi*
 - D. *Sumber Daya Manusia*
 - E. *Isu Strategis*
 - F. *Sistematika*
-





A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja merupakan implementasi dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja yang terintegrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. Penerapan SAKIP bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kementerian Sosial sebagai bagian dari pemerintahan yang bertanggungjawab terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia berupaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa menuju terciptanya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Pembangunan kesejahteraan sosial tentunya harus didukung selain oleh aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya, juga harus didukung dengan pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh penanggungjawab dan pelaksana program.

Sekretariat Jenderal melalui Biro Keuangan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi tata laksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kementerian Sosial, sebagaimana tugas dan fungsi Biro Keuangan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dengan dukungan anggaran dan program pada DIPA Biro Keuangan.

Laporan kinerja merupakan salah satu unsur dari SAKIP. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program kegiatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Biro Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2023 yang merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2023 serta sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja (*performance*) Biro Keuangan di Tahun 2024.



B. TUGAS DAN FUNGSI

Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial mempunyai tugas urusan pemerintahan di bidang sosial.

Sebagai bagian dari pemerintahan, Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial tentunya harus didukung selain oleh aparatur yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya, juga harus didukung dengan pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Biro Keuangan merupakan satuan kerja Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- (1) penyiapan dan koordinasi pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- (2) pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- (3) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- (4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- (5) pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mencapai sasaran yang direncanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, struktur organisasi Biro Keuangan sebagai berikut:



Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggaan Biro; dan

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sehubungan dengan perubahan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi, Kepala Biro Keuangan membentuk kelompok kerja melalui Surat Keputusan Nomor 307/1.2/OT.01.00/2/2023 tentang Tim Kerja di Lingkungan Biro Keuangan Tahun 2023. Tim Kerja tersebut terdiri dari:



Tim Kerja I

melaksanakan tugas dan fungsi ketatausahaan dan rumah tangga



Tim Kerja III

melaksanakan tugas dan fungsi Perbendaharaan.



Tim Kerja II

melaksanakan tugas dan fungsi Tata Laksana Keuangan



Tim Kerja IV

melaksanakan tugas dan fungsi Verifikasi dan Akuntansi.

Bukti dukung dapat diakses dengan cara memindai kode QR berikut:



atau melalui pranala berikut:
<bit.ly/SK/PokjaRakeu2023>



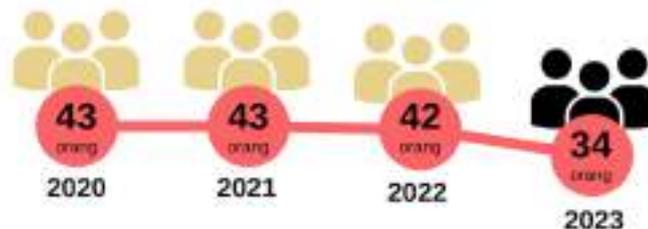
D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) adalah komponen penting yang berpengaruh dalam keberhasilan kinerja di lingkungan Biro Keuangan untuk mencapai rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data pada akhir tahun 2023, Biro Keuangan memiliki pegawai berjumlah 39 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Kepala Biro setingkat eselon II, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 13 orang pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), 20 orang Jabatan Fungsional Umum dan 5 (lima) orang PPNPN.



Berdasarkan data 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2020-2023, jumlah pegawai ASN pada Biro Keuangan menunjukkan penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Faktor utama penyebab hal ini adalah rasio jumlah pegawai yang keluar (mutasi/rotasi/pensiun) tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang masuk (CPNS/mutasi/rotasi).



Adapun demografis pegawai Biro Keuangan berdasarkan jabatannya sebagai berikut:



Komposisi SDM Biro Keuangan berdasarkan Jabatan



Komposisi SDM Biro Keuangan berdasarkan tingkat Pendidikan





Komposisi SDM Biro Keuangan berdasarkan Keilmuan



Komposisi SDM Biro Keuangan berdasarkan Usia



Pada tahun 2023, Indeks Profesionalitas ASN Biro Keuangan memperoleh nilai 56,64. Indeks Profesionalitas ASN merupakan potret kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi (25%), kompetensi (40%), kinerja (30%), dan kedisiplinan (5%) pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.



Masing- masing dimensi memiliki bobot penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Berdasarkan indeks tersebut, dimensi yang perlu ditingkatkan pada ASN Biro Keuangan agar profesionalitasnya turut meningkat adalah kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan seperti pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, workshop, bimbingan teknis, seminar/konferensi/sarasehan, e-learning, dan pelatihan lainnya.

Bukti dukung dapat diakses dengan cara meminda kode QR berikut.



atau melalui pranala berikut: <https://doi.org/10.24127/KepegawaianRokesi2023>



E. ISU STRATEGIS

Biro Keuangan memiliki peran strategis dalam melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan Kementerian Sosial. Pengelolaan Keuangan Negara sendiri didefinisikan sebagai sebuah siklus yang dimulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, Biro Keuangan juga mendukung pencapaian Sasaran Program Sekretariat Jenderal "Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas".

Pada tahun 2023, Kementerian Sosial berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tata kelola setelah melaksanakan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Sosial pada tahun 2022 lalu, sehingga isu strategis yang berkembang menjadi *trends* bagi Kementerian Sosial melalui Biro Keuangan dalam upaya meningkatkan tata kelola secara khusus dalam hal pengelolaan keuangan meliputi:



1. Upaya **peningkatan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan** pada lingkungan Kementerian Sosial
2. Munculnya **penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI** sebagai salah satu indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi
3. Perubahan **kebijakan dan aturan** terkait pengelolaan keuangan



F. SISTEMATIKA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:



BAB 1 - PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta isu strategis Biro Keuangan.



BAB 2 - PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Biro Keuangan Tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.



BAB 3 - AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan analisis pencapaian kinerja Biro Keuangan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis Tahun 2023.



BAB 4 - PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

-
- A. *Rencana Strategis Biro Keuangan Tahun 2020 - 2024*
 - B. *Indikator Kinerja Utama Tahun 2023*
 - C. *Rencana Kinerja Tahun 2023*
 - D. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
 - E. *Anggaran Tahun 2023*
-



A. RENCANA STRATEGIS BIRO KEUANGAN TAHUN 2023



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Keuangan 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Keuangan pada tahun 2023, dengan mengacu pada Renstra 2020-2024. Dalam rangka menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran di Biro Keuangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta strategi sebagai berikut:

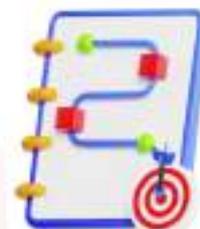


VISI

Mewujudkan pengelolaan keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang efektif, transparan dan akuntabel.

MISI

1. Melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola keuangan; serta
2. Melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan.



TUJUAN



Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan

Pada tahun 2023, berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Kementerian Sosial oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2022, Kementerian Sosial melakukan beberapa penyempurnaan dan perbaikan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial Tahun 2020-2024.

Merujuk pada penyempurnaan dan perbaikan dokumen Renstra Kementerian Sosial tersebut, maka kemudian Biro Keuangan melakukan penyesuaian sasaran dan indikator mengikuti penyesuaian sasaran dan indikator pada Sekretariat Jenderal. Berikut adalah keselarasan informasi kinerja dari tingkat Kementerian Sosial, Sekretariat Jenderal, dan Biro Keuangan setelah penyesuaian tersebut:

Kementerian Sosial	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan
<p>Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kementerian Sosial</p> <p><u>Indikator:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap layanan Kementerian Sosial 2. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial 	<p>Sasaran Program (SP) 4 Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kementerian Sosial</p> <p><u>Indikator:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kinerja anggaran Kementerian Sosial 2. Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial 	<p>Sasaran Kegiatan (SK) 1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan</p> <p><u>Indikator:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial 3. Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial
	<p>Sasaran Program (SP) 5 Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi</p> <p><u>Indikator:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Sekretariat Jenderal 	<p>Sasaran Kegiatan (SK) 2 Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi</p> <p><u>Indikator:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal 2. Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Keuangan 3. Nilai SAKIP Biro Keuangan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023



Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Keuangan, terdapat indikator yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Keuangan yang meliputi:

1. Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial; dan
3. Persentase tingkat realisasi atas target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Sosial.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang diuraikan dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP). Dokumen Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan beserta dengan sasaran, indikator kinerja, dan anggarannya. Renja kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Biro Keuangan tidak lagi menjadi kegiatan sendiri, tetapi disederhanakan sehingga berada pada Kegiatan 6288 - Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum. Kegiatan tersebut bersifat lintas unit kerja eselon II di Sekretariat Jenderal. Sehingga pada tahun 2023 Rincian Output (RO) Biro Keuangan terdiri dari:

1. Layanan Perkantoran
2. Layanan Manajemen Keuangan
3. Layanan Reformasi Kinerja
4. Layanan Umum



D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib membuat Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencantumkan indikator dan target kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang dibuat oleh kepala satker untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja berisikan sasaran, indikator kinerja dan target.

Perjanjian kinerja Biro Keuangan pada tahun 2023, ditetapkan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Januari, Februari, Oktober dan November. Perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan Pimpinan, penyesuaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja, serta pergeseran anggaran antar KRO dan antar Jenis Belanja pada Eselon I yang sama.

Perjanjian Kinerja setelah revisi menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Biro Keuangan tahun 2023 sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	IKK 1.1 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%
	IKK 1.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	90
	IKK 1.3 Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial	76,52%
SK.2 Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	IKK 2.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal	90
	IKK 2.2 Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Keuangan	90
	IKK 2.3 Nilai SAKIP Biro Keuangan	83

Bukti dukung dapat diakses dengan cara memindai kode QR berikut:



atau melalui pranala berikut:
bit.ly/AKIPRckeu2023



E. ANGGARAN TAHUN 2023

Pada awal tahun 2023 Biro Keuangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp140.115.678.000,00 yang bersumber dari APBN. Anggaran tersebut mengalami peningkatan sebesar 48,35% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam perjalanannya, terjadi pergeseran anggaran sebanyak tiga kali pada bulan Juli, September dan Oktober sehingga anggaran Biro Keuangan sampai dengan akhir tahun menjadi sebesar Rp83.011.888.000,00.



Bukti dukung dapat diakses dengan cara memindai kode QR berikut:



atau melalui pranala berikut:
bit.ly/RKAKLRokeu2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. *Capaian Kinerja Organisasi*
- B. *Analisis Capaian Kinerja*
- C. *Kinerja Lainnya*
- D. *Akuntabilitas Keuangan*
- E. *Analisis Efisiensi*





A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro Keuangan dengan realisasinya. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulan/ tahunan) sesuai dengan karakteristik dari masing-masing indikator kinerja. Capaian kinerja tersebut kemudian dilakukan pemantauan melalui aplikasi berbasis web pada aplikasi **Kinerjaku** milik Kementerian Sosial, **E-monev** milik Bappenas, serta melalui aplikasi **SMART** milik Kementerian Keuangan.

Capaian kinerja organisasi merupakan rata-rata dari capaian kinerja setiap indikator pada masing-masing sasaran kegiatan dengan perhitungan sebagai berikut:

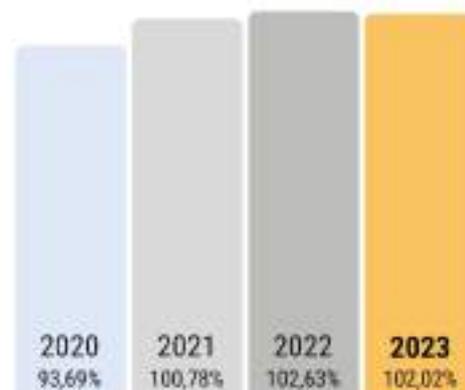

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Perhitungan tersebut digunakan untuk menghitung capaian kinerja organisasi Biro Keuangan atas 2 (dua) sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam 6 (enam) indikator yang ditetapkan pada tahun 2023.

Dari 6 (enam) indikator kinerja, terdapat 4 (empat) indikator yang capaiannya telah melampaui target ($> 100\%$), 1 (satu) indikator mencapai 100% dan terdapat 1 (satu) indikator yang masih dalam proses penilaian sehingga belum didapatkan realisasinya.



Rata-rata capaian kinerja Biro Keuangan mencapai sebesar 102,02% atau turun sebesar 0,61 poin dari capaian kinerja tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan target pada salah satu indikator kinerja.



Grafik 1. Perbandingan capaian kinerja Biro Keuangan Tahun 2020-2023

Tabel 1. Capaian Kinerja Biro Keuangan Tahun 2023 per Indikator

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	90	91,22	101,36%
	Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial	76,52%	83,56%	109,20%
Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal	90	91,35	101,50%
	Nilai SAKIP Biro Keuangan	83	83*	100%
	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Keuangan	90	90,08	100,09%
Rata-rata Capaian Kinerja				102,02%

(*) dalam proses penilaian APIP

Bukti dukung dapat diakses dengan cara memindai kode QR berikut:



atau melalui pranala berikut:
<https://s.kemensos.go.id/ihn>



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan capaian organisasi, maka diperlukan pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian Biro Keuangan pada Tahun 2023 juga perbandingan capaian saat ini terhadap target jangka menengah (lima tahun) yang telah ditetapkan melalui rencana strategis Biro Keuangan Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan, diuraikan sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1 | MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

Ringkasan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Sasaran Kegiatan (SK) 1 tercantum pada Tabel 2

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Biro Keuangan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100%	100%	100%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial	90	91,22	101,36%
	Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial	76,52%	83,58%	109,23%
Rerata Capaian				103.53%



IKK 1.1

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Sejak tahun 2015, Indonesia telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual (*accrual basis*).

SAP berbasis akrual memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, juga bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, serta efisiensi dan pencapaian tujuan.

Cara Perhitungan



SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

$$\frac{\sum \text{satker yang menyusun LK sesuai SAP}}{\sum \text{satker Kemensos yang menyusun LK}} \times 100\%$$

Sebagai salah satu kriteria pemberian opini laporan keuangan oleh BPK RI sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, divalidasi dan dinyatakan oleh BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2022 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 98.a/HP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, Kementerian Sosial mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%.

Tabel 3. Perbandingan Capaian IKK 1.1

IKK 1.1 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)										
2020		2021		2022		2023			2024	% Capaian Target Jangka Menengah
T	R	T	R	T	R	T	R	%	T	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

Tabel diatas menunjukkan persentase capaian kinerja terkait kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) selama 4 (empat) tahun terakhir mencapai 100%.

Hal ini disebabkan karena sistem dan koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan yang sudah ada baik kepada pihak internal maupun eksternal telah terlaksana dengan baik.

Kesuksesan pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan serta seluruh unit kerja Kementerian Sosial dalam hal melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



Faktor pendukung lainnya adalah pelaksanaan monitoring LK secara periodik (bulanan) dari sistem aplikasi, sehingga kendala/masalah dapat segera teridentifikasi dan dikonfirmasi kepada satker untuk segera ditangani.

Dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan, Biro Keuangan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan supervisi laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada 28 satker di lingkungan Kementerian Sosial.
- Penyusunan rancangan Keputusan Menteri Sosial tentang Kebijakan Akuntansi Bantuan Sosial (Bansos).
- Koordinasi pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Sosial dalam rangka penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Sosial tentang Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) dalam penyaluran Bansos dalam bentuk uang di lingkungan Kemensos.



- Konsolidasi Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan (PIPK) di Lingkungan Kementerian Sosial terkait dengan pelaksanaan penilaian atas penerapan PIPK.
- Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sosial, UKE I Sekretariat Jenderal dan Satker Sekretariat Jenderal.



Sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dari Laporan Keuangan Kementerian Sosial, Biro Keuangan akan berupaya untuk melaksanakan:

- Peningkatan pelaksanaan penilaian dan penerapan PIPK di lingkungan Kementerian Sosial.
- Mendorong penetapan rancangan Keputusan Menteri Sosial tentang Kebijakan Akuntansi Bantuan Sosial dan rancangan Keputusan Menteri Sosial tentang Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) dalam penyaluran Bansos dalam bentuk uang di lingkungan Kementerian Sosial.

Bukti dukung dapat diakses dengan cara memindai kode QR berikut:



atau melalui pranala berikut:
lnktr.ee/VERA_2023



IKK 1.2

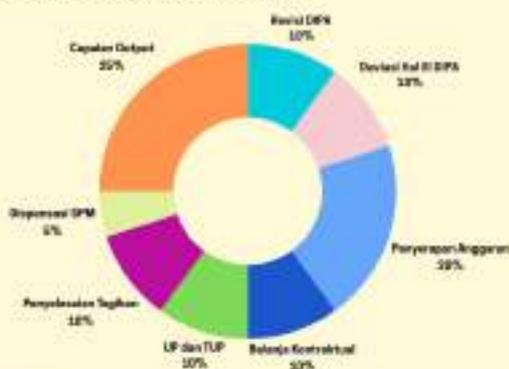
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.



Cara Perhitungan

IKPA memiliki total bobot 100% yang terbagi sebagai berikut:



$$\sum_{n=1}^8 \frac{(\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n)}{\text{Konversi Bobot}}$$

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi **OM-SPAN** yang dapat diakses melalui portal spanint.kemenkeu.go.id.

Kategori

- Sangat baik** : nilai IKPA ≥ 95
- Baik** : $89 \leq$ nilai IKPA < 95
- Cukup** : $70 \leq$ nilai IKPA < 89
- Kurang** : nilai IKPA < 70

Berdasarkan penarikan data dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan pada tanggal 24 Januari 2023, Nilai IKPA Kementerian Sosial mencapai nilai **91,22** atau dengan predikat **baik**.

Adapun sebaran satker berdasarkan kategori capaian IKPA tergambar pada **Grafik 2** sebagai berikut:

SANGAT BAIK

9 satker

BAIK

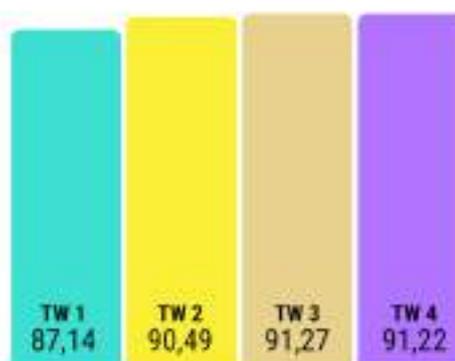
31 satker

CUKUP

5 satker

Grafik 2. Sebaran Capaian Nilai IKPA Satker

Tetapi, berdasarkan hasil pemantauan berkala secara triwulanan, nilai IKPA Kementerian Sosial cenderung menunjukkan *trend* peningkatan sebagaimana tergambar pada **Grafik 3**.



Grafik 3. Capaian IKPA Kementerian per triwulan

Tabel 4. Perbandingan Capaian IKK 1.2

IKK 1.2			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Sosial										
2020			2021			2022			2023			2024	% Capaian Target Jangka Menengah
T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	
90	88,13	92,36	89	91,76	103,10	89,25	91,88	102,95	90	91,22	101,46	90	101,46%

Tabel 4 menunjukkan perbandingan capaian atas Nilai IKPA Kementerian Sosial Tahun 2023 dengan Tahun 2020-2022 dan target untuk Tahun 2024.

Realisasi atas target IKPA Tahun 2023, capaian Biro keuangan sebesar 101,46% atau turun sebesar 1,49 poin dari capaian tahun 2022. Hal ini diakibatkan adanya perubahan target Nilai IKPA pada tahun 2023.

Penetapan target tersebut berdasarkan evaluasi atas capaian pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan indikator dengan nilai yang kurang optimal, yaitu **Deviasi Halaman III DIPA** dan **Belanja Kontraktual**.

Tabel 5 memperlihatkan nilai pada masing-masing indikator IKPA Kementerian Sosial Tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat indikator yang belum cukup optimal yaitu indikator **Deviasi Halaman III DIPA** dan indikator **Dispensasi SPM** dengan nilai < 89 atau belum mencapai kategori Baik.

Nilai untuk indikator **Deviasi Halaman III DIPA** belum maksimal dikarenakan penyaluran bansos yang dilaksanakan per triwulan tetapi tidak dilakukan penyesuaian pada saat melakukan *update* Halaman III DIPA.

Sementara, nilai indikator **Dispensasi SPM** belum maksimal karena tingginya jumlah dispensasi SPM yang terbit pada Triwulan IV.

Tabel 5. Nilai IKPA Kementerian Sosial Tahun 2023

Ket	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Akhir	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
Nilai	99,17	55,18	91,58	90,13	98,44	94,50	85	99,66	91,22	100%	91,22	
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
Nilai Akhir	992	552	1832	901	984	945	425	2491				
Nilai Aspek	77,18		91,92									99,66

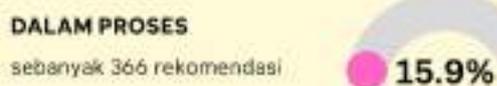
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. Hal ini dikarenakan salah satu penyebab timbulnya hasil pemeriksaan dan permasalahan yang sering muncul dalam proses penyelesaian TLHP sendiri adalah ketidaksesuaian pemakaian anggaran dengan pertanggungjawabannya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemantauan BPK RI per Semester II Tahun 2023 terdapat sebanyak **2.307 rekomendasi**.



Penyelesaian TLHP BPK RI sampai dengan Semester II Tahun 2023



Kegiatan Pendukung Capaian

Pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran didukung oleh beberapa kegiatan Biro Keuangan sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas pejabat perbendaharaan melalui pelaksanaan asistensi bagi pejabat perbendaharaan.
- Rekonsiliasi Data Rekening.
- Melakukan monitoring IKPA dan EPA secara periodik (bulanan, triwulanan maupun semester).
- Pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan pada 38 satker Kementerian Sosial yang mencakup pertanggungjawaban keuangan, pejabat pengelola keuangan maupun terkait kendala/masalah yang dihadapi oleh satker di lingkungan Kementerian Sosial.
- Penyusunan Rancangan Permensos tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
- Menerbitkan surat edaran terkait pengelolaan keuangan
- Asistensi peraturan/pedoman bidang keuangan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai.
- Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyelesaian Kerugian Negara.



Faktor Pendukung Capaian

Capaian tersebut juga didukung oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan serta seluruh unit kerja Kementerian Sosial dalam melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran serta untuk menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
- Adanya komunikasi yang baik dengan Kementerian Keuangan (cq. DJA, DJPb, KPPN) dan stakeholder terkait dengan perubahan kebijakan/ aturan maupun dalam hal penyelesaian kendala/masalah terkait pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.
- Adanya komunikasi dan koordinasi intensif dengan pengelola keuangan pada seluruh satker di lingkungan Kementerian Sosial untuk dalam hal menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

- Pelaksanaan pemantauan Pelaksanaan Anggaran (IKPA dan EPA) serta progress penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK secara periodik (bulanan, triwulanan maupun semester) maupun pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan pada satker di lingkungan Kementerian Sosial membantu satker menghadapi kendala/masalah terkait pengelolaan maupun pelaksanaan anggaran.
- Adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak internal (Biro OSDM dan Pusdiklatbangrof) serta pihak eksternal (BPKP dan Kementerian Keuangan) dalam hal pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi pengelola keuangan secara khusus Bendahara dan PPSPM di lingkungan Kementerian Sosial.



Gambar 10
Pelaksanaan Pendampingan Pengelolaan Keuangan



Rekomendasi

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dari Nilai IKPA Kementerian Sosial, Biro Keuangan akan berupaya untuk melaksanakan:

- Mendorong satker untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada IKPA.
- Mendorong satker untuk meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan melalui:
 - (a) Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker/K/L.
 - (b) Memastikan seluruh unit kerja/satker melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Hal III DIPA.

- (c) Mengingatkan unit kerja untuk melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
- (d) Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Hal III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).

- Selanjutnya, untuk meningkatkan capaian pada indikator Penyerapan Anggaran, perlu dilakukan beberapa sebagai berikut:
 - (a) Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan,
 - (b) Melakukan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); dan
 - (c) Meningkatkan akurasi dan melaksanakan percepatan penyaluran dana bansos.
- Melakukan penyusunan dan mendorong penetapan Rancangan Permensos tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Bukti dukung dapat diakses dengan cara memindai kode QR berikut:



atau melalui pranala berikut:
<https://s.kemensos.go.id/ihf>



IKK 1.3

Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan data dari aplikasi *Single Source Data* (SSD) PNBP, realisasi PNBP Kementerian Sosial pada Tahun 2023 mencapai sebesar Rp10.629.768.503,- atau 83,56% dari target penerimaan PNBP yang ditetapkan yaitu Rp12.720.940.000.

Cara Perhitungan



$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi PNBP}}{\Sigma \text{ Target PNBP}} \times 100\%$$

Realisasi PNBP didapatkan berdasarkan penarikan data pada aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan yaitu aplikasi *Single Souce Data* (SSD) PNBP dan/atau OM-SPAN

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKK 1.3

IKK 1.3		Persentase Tingkat Realisasi atas Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Sosial												
2020			2021			2022			2023			2024	% Capaian Target Jangka Menengah	
T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T		
100	76,82	76,82	72	65,96	91,60	74,26	81,79	110,14	76,52	83,56	109,20	80,72	103,52%	

Ruang Lingkup Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi indikator kinerja berikut meliputi PNBP Fungsional dan PNBP Umum yang berasal dari pemanfaatan BMN yang dikelola oleh satuan kerja pengelola PNBP di lingkungan Kementerian Sosial yang memiliki target penerimaan.



Adapun rincian daripada target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 per UKE I tersaji sebagai berikut:



Grafik 4. Rincian Target dan Realisasi PNBPNP per UKE I

Pencapaian kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 didukung oleh beberapa kegiatan Biro Keuangan sebagai berikut:

- Pelaksanaan monitoring realisasi PNBPNP secara periodik (bulanan, semester).
- Monitoring pengelolaan PNBPNP 17 satker pengelola PNBPNP di Kementerian Sosial.
- Penyusunan Laporan PNBPNP Kemensos TW IV Tahun 2022 dan TW II tahun 2023.
- Penyusunan Proposal Target dan Pagu PNBPNP Kementerian Sosial

Capaian tersebut juga didukung oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Adanya komunikasi yang baik dengan Kementerian Keuangan selaku regulator terkait dengan perubahan kebijakan/aturan.



Gambar 13. Monitoring PNBPNP pada BPPKS Yogyakarta bersama dengan Kementerian Keuangan (cq. Dit. PNBPNP)

- Biro Keuangan menyediakan layanan untuk satker melakukan konsultasi apabila menemui kendala/masalah terkait pencatatan maupun terkait dengan pengelolaan dan pelaporan PNBPNP.
- Pelaksanaan monitoring realisasi PNBPNP secara periodik (bulanan) dan penyusunan laporan PNBPNP berkala per Semester, serta adanya komunikasi intensif yang dibangun Biro Keuangan dengan satker pengelola PNBPNP membantu apabila terdapat kendala/masalah pada satker sehingga hal tersebut dapat segera diidentifikasi dan diberikan solusi.

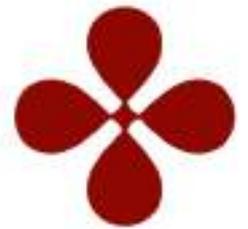
Sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dari pelaksanaan pengelolaan PNBPNP, Biro Keuangan akan berupaya untuk melaksanakan:

- Mengidentifikasi dan menginformasikan satker pengelola PNBPNP yang belum melaksanakan Pemutakhiran Tarif Sewa Atas Rumah Negara/ Rumah Dinas di lingkungan Kementerian Sosial untuk melaksanakan pemutakhiran tarif.
- Menjembatani unit kerja yang belum melaksanakan Pemutakhiran Tarif Sewa Atas Rumah Negara/ Rumah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial dengan pihak terkait (cq. Kementerian PUPR).

Bukti dukung dapat diakses dengan cara memindai kode QR berikut:



atau melalui pranala berikut:
<https://s.kemensos.go.id/ho>



SASARAN KEGIATAN 2 | TERWUJUDNYA SEKRETARIAT JENDERAL YANG AKUNTABEL DAN BERKINERJA TINGGI

Ringkasan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Sasaran Kegiatan (SK) 2 tercantum pada Tabel 7

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 Biro Keuangan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal	90	91,35	101,50%
	Nilai SAKIP Biro Keuangan	83	83*	100%
	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Biro Keuangan	90	90,08	100,09%
Rerata Capaian				100.53%



IKK 2.1

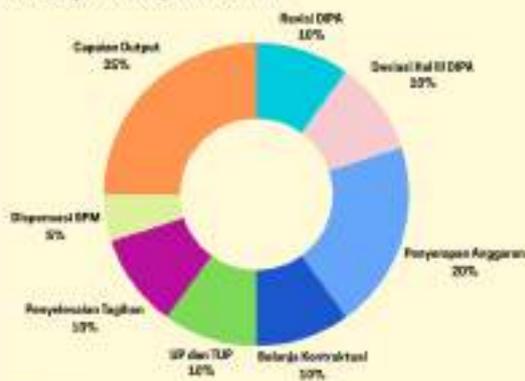
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.



Cara Perhitungan

IKPA memiliki total bobot 100% yang terbagi sebagai berikut:



$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator } n \times \text{Bobot Indikator } n)$$

Konversi Bobot

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses melalui portal spanint.kemenkeu.go.id.

Kategori

- Sangat baik** : nilai IKPA ≥ 95
- Baik** : $89 \leq$ nilai IKPA < 95
- Cukup** : $70 \leq$ nilai IKPA < 89
- Kurang** : nilai IKPA < 70

Berdasarkan penarikan data dari aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan pada tanggal 24 Januari 2023, Nilai IKPA Sekretariat Jenderal mencapai nilai **91,35** atau dengan predikat **baik**.

Adapun sebaran kategori capaian IKPA pada satker UKE I Sekretariat Jenderal berdasarkan tergambar pada **Grafik 5** sebagai berikut:



Grafik 5. Sebaran Capaian Nilai IKPA Satker UKE I Sekjen

Tetapi, berdasarkan hasil pemantauan berkala secara triwulanan, nilai IKPA pada UKE I Sekretariat Jenderal menunjukkan *trend* peningkatan sebagaimana tergambar pada **Grafik 6**.



Grafik 6. Capaian IKPA UKE I Sekjen per triwulan

Tabel 8. Perbandingan Capaian IKK 2.1

IKK 2.1		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Jenderal								
2020		2021		2022		2023			2024	% Capaian Target Jangka Menengah
T	R	T	R	T	R	T	R	%	T	
N/A	81,84	N/A	80,23	N/A	90,4	90	91,35	101,50	90	101,50%

Nilai IKPA Sekretariat Jenderal Tahun 2023 merupakan indikator yang baru ditetapkan sebagai indikator kinerja Biro Keuangan pada tahun ini. Oleh karena itu, pada **Tabel 8** terlihat bahwa perbandingan capaian atas Nilai IKPA Sekretariat Jenderal belum dapat disandingkan dengan Tahun 2020-2022 dan target untuk Tahun 2024. Tetapi untuk Tahun 2023, Capaian atas target IKPA Sekretariat Jenderal mencapai sebesar 101,5%.

Tabel 9 memperlihatkan nilai pada masing-masing indikator IKPA UKE I Sekretariat Jenderal Tahun 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat indikator yang belum cukup optimal yaitu indikator **Deviasi Halaman III DIPA** dan indikator **Dispensasi SPM** dengan nilai < 89 atau belum mencapai kategori Baik.

Nilai untuk indikator **Deviasi Halaman III DIPA** belum maksimal dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran dan tidak dilakukan pemutakhiran RPD sehingga menyebabkan deviasi yang melebihi 5% (lima persen).

Sementara, nilai indikator **Dispensasi SPM** belum maksimal karena tingginya jumlah dispensasi SPM yang terbit pada Triwulan IV.

Tabel 9. Nilai IKPA UKE I Sekretariat Jenderal Tahun 2023

Ket	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Akhir	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
Nilai	100	71,41	90,82	97,36	98,85	91,96	85	90,96	51,35	100%	91,35	
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
Nilai Akhir	10	714	1616	974	989	920	425	2498				
Nilai Aspek	85,71		90,80						99,91			



Pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran UKE I Sekretariat Jenderal didukung oleh pelaksanaan beberapa kegiatan Biro Keuangan yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Sosial, dengan tambahan kegiatan yang spesifik untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran UKE I Sekretariat Jenderal sebagai berikut:

- Pelaksanaan Evaluasi Pencairan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal
- Rekonsiliasi Pemutakhiran Hal III DIPA

Capaian tersebut juga didukung oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan serta seluruh unit kerja Kementerian Sosial dalam melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran serta untuk menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

- Adanya komunikasi yang baik dengan Kementerian Keuangan (cq. DJA, DJPb, KPPN) dan stakeholder terkait dengan perubahan kebijakan/ aturan maupun dalam hal penyelesaian kendala/masalah terkait pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.
- Penyebaran informasi terkini terkait pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang dilakukan secara cepat melalui media komunikasi *Whatsapp Group* (WAG) membantu unit-unit di lingkungan satker Sekretariat Jenderal maupun satker di lingkungan UKE I Sekretariat Jenderal untuk dapat segera mengambil keputusan guna menindaklanjuti informasi yang disampaikan tersebut.

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dari Nilai IKPA UKE I Sekretariat Jenderal, Biro Keuangan akan melaksanakan:

- Mendorong satker untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada IKPA.

- Mendorong satker untuk meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan melalui:
 - (a) Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker/K/L.
 - (b) Memastikan seluruh unit kerja/satker melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Hal III DIPA.
 - (c) Mengingatkan unit kerja untuk melakukan *update* Halaman III DIPA setiap Triwulan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
 - (d) Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Hal III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).
- Selanjutnya, untuk meningkatkan capaian pada indikator Penyerapan Anggaran, perlu dilakukan beberapa sebagai berikut:
 - (a) Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - (b) Melakukan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); dan

- Melakukan penyusunan dan mendorong penetapan Rancangan Permensos tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Bukti dukung dapat diakses dengan cara memindai kode QR berikut:



atau melalui pranala berikut:
<https://s.kemensos.go.id/1/>



IKK 2.2 Nilai SAKIP Biro Keuangan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didapatkan melalui pelaksanaan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas atas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Cara Perhitungan



Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP pada Biro Keuangan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh APIP.

Predikat

Sangat Memuaskan (AA)	: > 90 - 100
Memuaskan (A)	: > 80 - 90
Sangat Baik (BB)	: > 70 - 80
Baik (B)	: > 60 - 70
Cukup (Memadai) (C)	: > 50 - 60
Kurang (D)	: > 30 - 50
Sangat Kurang (E)	: > 0 - 30

Tabel 9 menyajikan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan pada tahun 2020-2022 serta perbandingannya dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Capaian IKK 2.2

IKK 2.2			Nilai SAKIP Biro Keuangan										
2020			2021			2022			2023			2024	% Capaian Target Jangka Menengah
T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	
N/A	81,16	N/A	81	81,74	100,91	82	80,18	97,78	83	83*	100	84	98,80%

Dikarenakan penilaian atau hasil evaluasi AKIP untuk tahun 2023 masih dalam proses pelaksanaan evaluasi, maka realisasi tahun 2023 untuk indikator berikut menggunakan realisasi sementara sesuai target.

Sehingga persentase capaian atas target jangka menengah yang disajikan pada tabel di atas, merupakan persentase capaian tahun 2023 atas target jangka menengah pada tahun 2024 yaitu sebesar 98,80%.

Adapun upaya yang dilakukan Biro Keuangan dalam rangka mempertahankan kategori **Memuaskan (A)** yang berhasil didapatkan Biro Keuangan pada Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2020-2022 lalu dan untuk mencapai target tahun 2023 pada indikator adalah melakukan penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja Biro Keuangan yang meliputi:

- (1) Penyusunan rencana kinerja yang terdiri dari Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), Rencana Aksi (Renaksi), serta pelaksanaan reviu Rencana Strategis (Renstra) Biro Keuangan.
- (2) Selain melaksanakan penyusunan rencana kinerja, Biro Keuangan juga melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) sebagai bentuk pelaporan kinerja Biro Keuangan dalam rangka melakukan pengukuran kinerja dan mempertanggungjawabkan serta mengevaluasi kinerja Biro Keuangan untuk peningkatan kinerja organisasi.

- (3) Berkaitan dengan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporannya, SAKIP juga berkaitan dengan pengendalian dan komitmen pimpinan didalamnya. Biro Keuangan mewujudkannya dengan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap masing-masing indikator kinerja Biro Keuangan. Hal ini juga terkait dengan penerapan manajemen kinerja di Biro Keuangan melalui penilaian sasaran kinerja pegawai di Biro Keuangan yang dilakukan pada aplikasi berbasis web pada portal *kinerja.bkn.go.id*.
- (4) Melakukan identifikasi dan analisis resiko yang dilaksanakan secara daring melalui tautan <https://s.kemensos.go.id/ihq>

Buku dukung dapat diakses dengan cara memindai kode QR berikut:



atau melalui pranala berikut:
[HTTPS://S.KEMENSOS.GO.ID/IHR](https://s.kemensos.go.id/ihr)



IKK 2.3

Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Keuangan

Indikator Kinerja Nilai Survei Kepuasan Layanan Biro Keuangan dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun pertanyaan dalam kuesioner memuat 9 unsur penilaian berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tersebut, yang meliputi:

- Persyaratan (U1)
- Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan (U2)
- Waktu penyelesaian (U3)
- Biaya/tarif (U4)
- Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5)
- Kompetensi Pelaksana (U6)
- Perilaku pelaksana (U7)
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
- Sarana dan prasarana (U9)

Pelaksanaan survei kepuasan atas layanan Biro Keuangan dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan *stakeholder* Biro Keuangan terhadap pelaksanaan layanan Biro Keuangan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2023 dengan cara perhitungan sebagai berikut:



Cara Perhitungan

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

$$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{Nilai Konversi SKM} = \text{SKM unit pelayanan} \times 25$$

Mutu Pelayanan

A (Sangat baik)	: 88,31 - 100
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

Adapun layanan Biro Keuangan tersebut meliputi:

1. Pembayaran gaji dan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal. Pelaksanaan satu DIPA di lingkungan Kementerian Sosial termasuk dalam pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan juga dalam pelaksanaan layanan pembayaran perjalanan dinas pimpinan. Biro Keuangan telah melaksanakan layanan pembayaran gaji kepada 424 orang pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal per Desember 2023. Layanan pembayaran gaji pegawai mencakup juga pengelolaan dan rekapitulasi data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang terdampak pelaksanaan mutasi, rotasi, pensiun maupun pegawai yang meninggal dunia di lingkungan Sekretariat Jenderal.
2. Biro Keuangan melaksanakan peranan sebagai pembina jabatan fungsional PK dan APK APBN pada lingkungan Kementerian Sosial.

2. Layanan Pengelolaan Keuangan yang mencakup layanan terkait pelaksanaan dan pengelolaan keuangan serta layanan terkait penyusunan laporan keuangan.

Survei Kepuasan Layanan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan diikuti oleh **238 responden** dan dilaksanakan melalui media *google form* yang dapat diakses melalui pranala berikut <https://bit.ly/2023SurveiLayananRokeu> yang disampaikan melalui Surat Plt. Kepala Biro Keuangan Nomor 56/1.2/KU.00.00/1/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Permohonan Pengisian Survei Kepuasan Layanan Biro Keuangan.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

- (1) Kualitas sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 88,55. Kemudian untuk nilai terendah kedua adalah penanganan pengaduan yang mendapatkan nilai 88,87. Selanjutnya unsur kesesuaian pelayanan dengan nilai 88,97 merupakan unsur terendah ketiga.
- (2) Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu kesesuaian/kewajaran biaya mendapatkan nilai 96,11 dari unsur layanan, disusul dengan unsur perilaku petugas pelayanan dengan nilai 90,14 dan unsur kesesuaian persyaratan menempati nilai tertinggi ketiga yaitu 89,60.

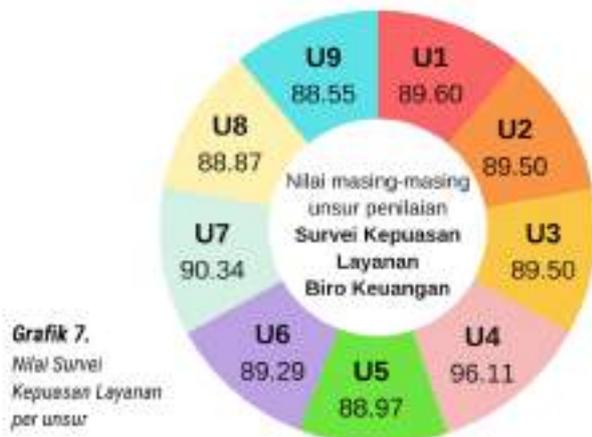
Tabel 10. Perbandingan Capaian IKK 2.3

IKK 2.3			Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Keuangan										
2020			2021			2022			2023			2024	% Capaian Target Jangka Menengah
T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	
N/A	N/A	N/A	77	83,93	109	90	90,05	100,05	90	90,08	100,09	90	100,09%

Tabel 10 di atas menyajikan perbandingan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020-2023 serta terhadap target jangka menengah. Berdasarkan hasil survei yang telah di konversi, hasil SKM Layanan Biro Keuangan mendapatkan nilai **90,08** dengan indeks **3,60**. Sehingga secara kategori Mutu Pelayanan, Biro Keuangan termasuk dalam **kategori A**. Dengan demikian, Layanan Biro Keuangan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Layanan tahun 2023 adalah **SANGAT BAIK**. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja penyelenggaraan pelayanan Biro Keuangan dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan.

Adapun upaya yang akan dilakukan Biro Keuangan untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Biro Keuangan adalah:

- (1) Meningkatkan koordinasi dengan pengelola tempat untuk meningkatkan kualitas pada unsur sarana dan prasarana.
- (2) Pengembangan dan pelaksanaan aplikasi KLIK-KEU (Klinik Keuangan) untuk menindaklanjuti saran perbaikan terhadap unsur penanganan pengaduan.
- (3) Penyusunan buku saku terkait pengelolaan keuangan melalui diskusi dengan melibatkan Tim Inspektorat Jenderal dan Kementerian/Lembaga terkait.



Grafik 7. Nilai Survei Kepuasan Layanan per unsur

Bukti dukung dapat diakses dengan cara memindai kode QR berikut:



atau melalui pranala berikut: [HTTPS://S.KEMENSOS.GO.ID/IHS](https://s.kemensos.go.id/ihs)



C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran perlu dikelola dengan efektif dan efisien sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

REALISASI ANGGARAN
BIRO KEUANGAN TA. 2023

99.18%



Terdapat peningkatan realisasi bila dibandingkan dengan realisasi anggaran Biro Keuangan pada tahun 2022 lalu yang hanya mencapai 83,26%. Salah satu hal yang mempengaruhi hal tersebut adalah karena adanya perencanaan dan perhitungan yang matang terkait penggunaan anggaran belanja pegawai agar dapat dilakukan pergeseran untuk pemenuhan kebutuhan lainnya pada satker maupun unit kerja Kementerian Sosial.



Grafik 8. Perbandingan Pagu dan Realisasi Biro Keuangan Tahun 2023

Adapun rincian realisasi anggaran Biro Keuangan TA. 2023 berdasarkan Jenis Belanja tersaji sebagai berikut:

Tabel 11. Realisasi Anggaran Biro Keuangan TA 2023 per jenis belanja

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA
Belanja Pegawai	Rp57.619.211.000,-	Rp56.983.880.348,-	98,90%	Rp635.330.652,-
Belanja Barang	Rp25.392.677.000,-	Rp25.345.321.777,-	99,81%	Rp47.355.223,-
Operasional	Rp19.326.724.000,-	Rp19.321.834.352,-	99,36%	Rp4.889.648,-
Non-Ops	Rp6.065.953.000,-	Rp6.023.487.425,-	99,30%	Rp42.465.575,-
TOTAL	Rp83.011.888.000,-	Rp82.329.202.125,-	99,18%	Rp682.685.875,-

Anggaran merupakan salah satu sumber daya yang digunakan sebagai *input* untuk mencapai *output* sasaran strategis yang ditetapkan. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Biro Keuangan TA 2023 berdasarkan sasaran kegiatan tersaji sebagai berikut:

Tabel 12. Realisasi Anggaran Biro Keuangan TA 2023 per Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Rp4.922.065.000,-	Rp4.911.179.056,-	99,78%
Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Rp78.089.823.000,-	Rp77.418.023.069,-	99,14%
TOTAL	Rp83.011.888.000,-	Rp82.329.202.125,-	99,18%

Sedangkan rincian pagu, realisasi dan persentase realisasi anggaran Biro Keuangan TA. 2023 berdasarkan komponen Biro Keuangan tersaji pada matriks sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Anggaran Biro Keuangan TA 2023 per Komponen

KOMPONEN	PAGU	REALISASI	%	SISA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Gaji dan Tunjangan	Rp57.619.211.000,-	Rp56.983.880.348,-	98,90%	Rp635.330.652,-
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp19.326.724.000,-	Rp19.321.834.352,-	99,36%	Rp4.889.648,-
Pengelolaan Keuangan	Rp2.746.333.000,-	Rp2.740.345.241,-	99,78%	Rp5.987.759,-
Pelaporan Keuangan	Rp2.284.587.000,-	Rp2.278.622.815,-	99,74%	Rp5.964.185,-
Dukungan Internal Biro Keuangan	Rp949.529.000,-	Rp919.015.369,-	96,79%	Rp30.513.631,-
Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Biro Keuangan	Rp85.504.000,-	Rp85.504.000,-	100%	Rp0,-
TOTAL	Rp83.011.888.000,-	Rp82.329.202.125,-	99,18%	Rp682.685.875,-



D. ANALISIS EFISIENSI

Dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, Biro Keuangan melakukan beberapa efisiensi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan beberapa kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran bekerjasama dengan Kementerian Keuangan (cq. DJPb, KPPN) yang dilaksanakan secara daring melalui ZOOM sehingga seluruh satker di lingkungan Kementerian Sosial dapat mengikuti kegiatan tersebut.
2. Pelaksanaan pendampingan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan permintaan dari satker yang bersangkutan memberikan kesempatan untuk melaksanakan *monitoring* tindak lanjut dari hasil pendampingan yang telah dilakukan oleh Biro Keuangan.
3. Pelaksanaan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Sosial tentang Penggunaan BAS dalam penyaluran Bansos dalam bentuk uang di lingkungan Kemensos yang dilaksanakan bersamaan dengan koordinasi pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Sosial.
4. Penyampaian beberapa Buku kumpulan peraturan terkait tunjangan kinerja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring, pendampingan maupun supervisi yang dilaksanakan Biro Keuangan.

Tabel 14. *Sandingan Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran*

SASARAN KEGIATAN	REALISASI CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	103,52%	99,78%
Terwujudnya Sekretariat Jenderal yang akuntabel dan berkinerja tinggi	100,53%	99,14%
TOTAL	102,02%	99,18%

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan, secara umum Biro Keuangan telah efisien dalam penggunaan anggaran. Hal ini dikarenakan adanya selisih sebesar **2,84%** antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran Biro Keuangan.

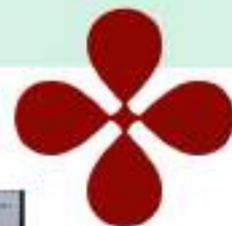


E. KINERJA LAINNYA

Biro Keuangan memiliki penugasan lainnya selain kinerja dengan target capaian yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang meliputi:

1. Biro Keuangan memperoleh penghargaan sebagai unit kearsipan dengan kategori **AA (sangat memuaskan) dengan nilai 92,49** berdasarkan hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Biro Umum.
2. Berdasarkan nota dinas 777/1.2/KU.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Undangan Rapat, Biro Keuangan melaksanakan koordinasi dengan UKE I pengelola program serta dengan kementerian terkait sehubungan dengan perhitungan *financial benefit* dan inovasi Kementerian Sosial terkait penyesuaian tunjangan kinerja.
3. Berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Keuangan Nomor 739/1.2/PS.10/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023, Biro Keuangan berpartisipasi dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan pelaksanaan penilaian mandiri Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
4. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Sosial. Selain itu, Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat Nasional Kementerian Sosial Republik Indonesia, Biro Keuangan berperan sebagai Bendahara. Masih berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tim Sekretariat Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kementerian Sosial Republik Indonesia, Biro Keuangan berperan sebagai ketua Tim Sekretariat Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Selain itu, atas pendampingan yang dilakukan Biro Keuangan terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan, beberapa UPT di lingkungan Kementerian Sosial mendapatkan penghargaan dalam bidang keuangan beberapa diantaranya meliputi:



Sentra Abiseka di Pekanbaru mendapatkan peringkat I kategori penggunaan KKP di lingkup kerja KPPN Pekanbaru



Sentra Pangurangi di Takalar mendapatkan peringkat I kategori satker dengan ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan UAKPA Terbaik Tahun 2023 di lingkup kerja KPPN Makassar II



Sentra Budi Perkasa di Palembang mendapatkan peringkat II kategori Pagu Besar dalam penilaian Penyelesaian LPJ Bendahara Terbaik Semester II Tahun 2023 di lingkup kerja KPPN Palembang



Sentra Satria di Baturaden mendapatkan peringkat Terbaik III untuk kategori LPJ Bendahara Pengeluaran Kategori UP 100 Juta Keatas pada KPPN Purwokerto



Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi mendapatkan peringkat Terbaik I pada kategori pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Periode Tahun 2023 dan peringkat Terbaik II pada kategori Pengguna Digipay Satu Periode Tahun 2023 pada lingkup kerja KPPN Tipe A1 Bekasi

Bukti dukung dapat diakses dengan cara memindai kode QR berikut:



atau melalui pranala berikut:
<https://bit.ly/ROKELU-KinerjaTambahan2023>

BAB IV

PENUTUP

- A. *Kesimpulan*
- B. *Tindak Lanjut*





A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Biro Keuangan 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran Biro Keuangan tahun 2023 dan perkembangan dari kinerja tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian indikator kinerja. Secara umum capaian kinerja Biro Keuangan menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun terdapat indikator yang belum didapatkan hasilnya.

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 yang mencapai 102,02% dari target yang ditetapkan, sehingga secara keseluruhan capaian kinerja Biro Keuangan dapat dinyatakan "berhasil". Penambahan indikator kinerja sebagai tindak lanjut dari hasil reviu Renstra Kementerian Sosial yang kemudian dilakukan penyesuaian informasi kinerja sampai dengan level organisasi di bawahnya, juga tidak menyurutkan semangat Biro Keuangan untuk berupaya mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Dari 6 (enam) indikator, hampir seluruhnya telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan penetapan target sebagai salah satu upaya dalam peningkatan kinerja Biro Keuangan kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan arahan Pimpinan untuk senantiasa melakukan inovasi dalam bekerja dan tidak hanya melakukan pekerjaan *bussiness as usual*.

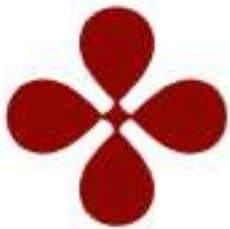
B. TINDAK LANJUT

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa hampir semua indikator kinerja Biro Keuangan telah mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Mempertimbangkan hal tersebut, Biro Keuangan diharapkan senantiasa mempertahankan capaian yang telah diperoleh. Di samping itu, perlu juga dilakukan reviu kembali baik terhadap penetapan target agar lebih *challenging* maupun terhadap perumusan indikator yang lebih bersifat *outcome* untuk periode Renstra berikutnya.



LAMPIRAN





LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIRO KEUANGAN
KEMENTERIAN SOSIAL RI
TA. 2023

